

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAKAN
EKSPLOITASI SUMUR MINYAK ILEGAL
(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6572
K/Pid.Sus-LH/2023)**

SAHAT SODIPTA PRIA UTAMA BANUAREA*

Dr.Panca Sarjana Putra,SH.,M.H.**

Dr.Ahmad Rusli Purba.,S.I.P.,SH.,M.H.***

ABSTRAK

Minyak bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. "Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier".

Pengaturan hukum proses eksploitasi sumur minyak yang dibenarkan dalam perundang-undangan migas di Indonesia. Pengaturan pertambangan minyak dan gas bumi diatur dalam hukum. Pertanggungjawaban pidana atas tindakan eksploitasi sumur minyak tanpa ijin yang dibenarkan dalam undang-undang adalah tindakan tersebut melanggar hukum dan berpotensi menimbulkan kerugian besar, baik bagi negara, lingkungan, maupun masyarakat. sanksi yang tegas untuk mencegah tindakan serupa di masa depan. Kedua titik sumur minyak milik Terdakwa berada di tanah milik orang lain yaitu milik Sdr. Doidiah.

Disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal di dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi mengenai pemidanaan dan sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi. dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal 60 miliar. Tindak pidana ini diatur dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 52. Alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Eksploitasi, Sumur Minyak Ilegal

* Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

** Dosen Pembimbing I Penulis Pada Penulisan Tesis DI Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UISU

*** Dosen Pembimbing II Penulis Pada Penulisan Tesis DI Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UISU

**CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR ILLEGAL OIL WELL
EXPLOITATION ACTIONS**
(Study of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Decision
Number 6572 K/Pid.Sus-LH/2023)

SAHAT SODIPTA PRIA UTAMA BANUAREA^{*}

Dr.Panca Sarjana Putra,SH.,M.H.^{**}

Dr.Ahmad Rusli Purba.,S.I.P.,SH.,M.H.^{***}

ABSTRACT

Petroleum is a strategic non-renewable natural resource controlled by the state and is a vital commodity that controls the livelihoods of many people and plays an important role in the national economy.

This research is descriptive with a normative legal approach. "The normative legal approach emphasizes legal science by emphasizing secondary data, in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials".

Legal regulations for the process of exploiting oil wells that are permitted in oil and gas legislation in Indonesia. Regulations for oil and gas mining are regulated by law. Criminal liability for acts of exploiting oil wells without a permit that are permitted by law is that such actions violate the law and have the potential to cause major losses, both for the state, the environment, and society. strict sanctions to prevent similar actions in the future. The two oil wells owned by the Defendant are on land owned by someone else, namely Mr. Doidiah.

It is concluded that in the articles in the Oil and Gas Law concerning criminal penalties and criminal sanctions for perpetrators of misuse of subsidized fuel oil. with a maximum prison sentence of 6 years and a maximum fine of 60 billion. This crime is regulated in the Oil and Gas Law, Article 52. The reason for the cassation cannot be justified because it is not subject to the cassation level examination, so the cassation application is declared rejected

Keywords: Accountability, Exploitation, Illegal Oil Wells

^{*} Students of the Master of Law Study Program at the Faculty of Law, Islamic University of North Sumatra

^{**} Advisor I Writer on thesis writing in the Master of Law Program, Faculty of Law, Islamic University of North Sumatra

^{***} Advisor II Writer on thesis writing in the Master of Law Program, Faculty of Law, Islamic University of North Sumatra